



# LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA



TRIWULAN I

20  
26



# LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Disahkan Tanggal: 31 Maret 2026

Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya

**Muchammad Toha**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai persepsi peserta pelatihan terhadap praktik korupsi selama kegiatan pelatihan berlangsung. Diharapkan laporan ini dapat menjadi salah satu acuan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, baik dalam pelaksanaan survei maupun dalam proses penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga tersusunnya laporan ini.

Surabaya, Maret 2026

Tim Pelaksana

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1. LATAR BELAKANG .....	6
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN .....	7
1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI .....	7
BAB II METODE PENGUKURAN .....	8
2.1. POPULASI DAN SAMPEL.....	8
2.2. WAKTU DAN TEMPAT .....	8
2.3. RESPONDEN.....	8
2.4. KUESIONER.....	8
2.5. NILAI PERSEPSI.....	9
BAB III HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI .....	10
3.1. PROFIL RESPONDEN .....	10
3.2. HASIL PERHITUNGAN IPAK .....	14
3.3. REKAPITULASI NILAI.....	23
BAB IV PENUTUP .....	26
4.1. KESIMPULAN .....	26
4.2. REKOMENDASI .....	26
LAMPIRAN .....	27

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Karakteristik Gender Responden.....	11
Gambar 3.2.	Karakteristik Kelompok Umur Responden.....	12
Gambar 3.3.	Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden.....	13
Gambar 3.4.	Karakteristik Pangkat/Golongan Responden.....	13
Gambar 3.5.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan.....	15
Gambar 3.6.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan.....	16
Gambar 3.7.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh.....	16
Gambar 3.8.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah.....	17
Gambar 3.9.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya.....	18
Gambar 3.10.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan.....	19
Gambar 3.11.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang.....	20
Gambar 3.12.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia.....	21
Gambar 3.13.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan.....	22
Gambar 3.14.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan.....	23
Gambar 3.15.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian.....	25

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai Persepsi .....	9
Tabel 3.1.	Pelatihan oleh BDK Surabaya Maret 2024 .....	10
Tabel 3.2.	Tingkat Partisipasi Survei .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3.3.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan .....	14
Tabel 3.4.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan.....	15
Tabel 3.5.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh .....	16
Tabel 3.6.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah .....	17
Tabel 3.7.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya .....	18
Tabel 3.8.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan.....	19
Tabel 3.9.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang .....	20
Tabel 3.10.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia.....	20
Tabel 3.11.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan .....	21
Tabel 3.12.	Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan.....	22
Tabel 3.13.	Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya .....	23
Tabel 3.14.	Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan.....	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Balai Diklat Keagamaan Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu bentuk implementasi dari komitmen tersebut adalah penyusunan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Surabaya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pendidikan dan keagamaan. Melalui penyelenggaraan berbagai program pengembangan kompetensi, BDK Surabaya bertanggung jawab untuk membekali aparatur dengan kemampuan yang relevan, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai Diklat Keagamaan Surabaya senantiasa berorientasi pada kualitas layanan kepada peserta kegiatan bangkom sebagai pengguna layanan, sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan yang berintegritas, dilakukan pengukuran persepsi masyarakat, khususnya peserta kegiatan bangkom, terhadap penyelenggaraan layanan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Persepsi yang positif tercermin dari tingginya nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang diperoleh, yang menunjukkan keberhasilan lembaga dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih. Sebaliknya, nilai IPAK yang rendah dapat menjadi indikasi perlunya perbaikan dalam kualitas pelayanan. Oleh karena itu, hasil pengukuran IPAK ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan yang bebas dari praktik korupsi.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Secara umum maksud dan tujuan dilaksanakannya Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Di samping itu, juga bertujuan untuk mendapatkan referensi yang valid dalam menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara kontinyu serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi diharapkan dapat menjadi rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN**

Dalam laporan ini, pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi di Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilakukan dalam kurun waktu Triwulan pertama Tahun 2026 dengan melibatkan peserta yang mengikuti kegiatan bangkom selama kurun waktu tersebut.

## **1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI**

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

# BAB II

## METODE PENGUKURAN

### 2.1. POPULASI DAN SAMPEL

Dalam kegiatan ini, yang menjadi populasi adalah seluruh peserta kegiatan bangkom di BDK Surabaya, yaitu peserta kegiatan Bimbingan Teknis Ekoteologi dan Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *voluntary response sampling* yaitu penentuan sampel yang terdiri dari *self-chosen respondent*. Dalam arti lain, para responden secara sukarela mengambil bagian dalam studi penelitian untuk berbagi pendapat mereka tentang topik yang sedang dibahas. Teknik ini dipilih atas pertimbangan kemudahan dan efisiensi waktu. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan metode pengumpulan data berupa survei secara *online* via *google form* dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif.

### 2.2. WAKTU DAN TEMPAT

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan pada Maret 2026. Hal ini dilakukan dengan alasan hanya pada bulan Maret BDK Surabaya memberikan layanan bangkom. Survei dilaksanakan secara *online* di tempat kegiatan masing-masing. Responden menjawab pertanyaan yang diajukan melalui *google form*. Kuesioner survei dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/persepsikorupsi2026>

### 2.3. RESPONDEN

Kriteria untuk responden Survei Persepsi Anti Korupsi adalah peserta kegiatan bangkom yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya selama Maret 2026. Responden yang dipilih ialah mereka yang sedang atau telah menerima layanan pengembangan kompetensi dalam waktu referensi survei berlangsung.

### 2.4. KUESIONER

Kuesioner dipilih sebagai alat bantu pengumpulan data guna menyusun Indeks Persepsi Anti Korupsi. Unsur yang dipakai untuk mengukur persepsi peserta pelatihan dalam survei ini sebanyak sepuluh unsur yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban berskala

ordinal, yaitu “selalu”, “sering”, “jarang”, “tidak ada” dengan skor untuk masing-masing jawaban dari angka 1,2,3, dan 4. Kesepuluh unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Manipulasi peraturan;
- 2) Penyalahgunaan jabatan;
- 3) Menjual pengaruh;
- 4) Hadiah;
- 5) Transparansi Biaya;
- 6) Pencaloan;
- 7) Perbuatan curang;
- 8) Transaksi rahasia;
- 9) Transparansi Aduan
- 10) Respon terhadap pengaduan.

## 2.5. NILAI PERSEPSI

Penilaian persepsi sangat penting dalam mengukur hasil pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi. Dalam membaca interval hingga penilaian kinerja pelayanan, tabel nilai persepsi dapat memandu masyarakat dalam menyimpulkan kinerja pelayanan suatu institusi. Sehingga baik institusi maupun masyarakat nantinya dapat memberikan sumbangsih saran, pendapat hingga kritikan yang membangun. Berikut adalah nilai persepsi, nilai interval, nilai konversi, mutu, dan kinerja pelayanan.

Tabel 2.1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

# BAB III

## HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

### 3.1. PROFIL RESPONDEN

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, Balai Diklat Keagamaan Surabaya melaksanakan dua bentuk pengembangan kompetensi, yakni Bimbingan Teknis dan Pelatihan. Kegiatan ini diselenggarakan di delapan wilayah kerja Kantor Kementerian Agama. Rincian pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi tersebut dapat dilihat pada daftar berikut.

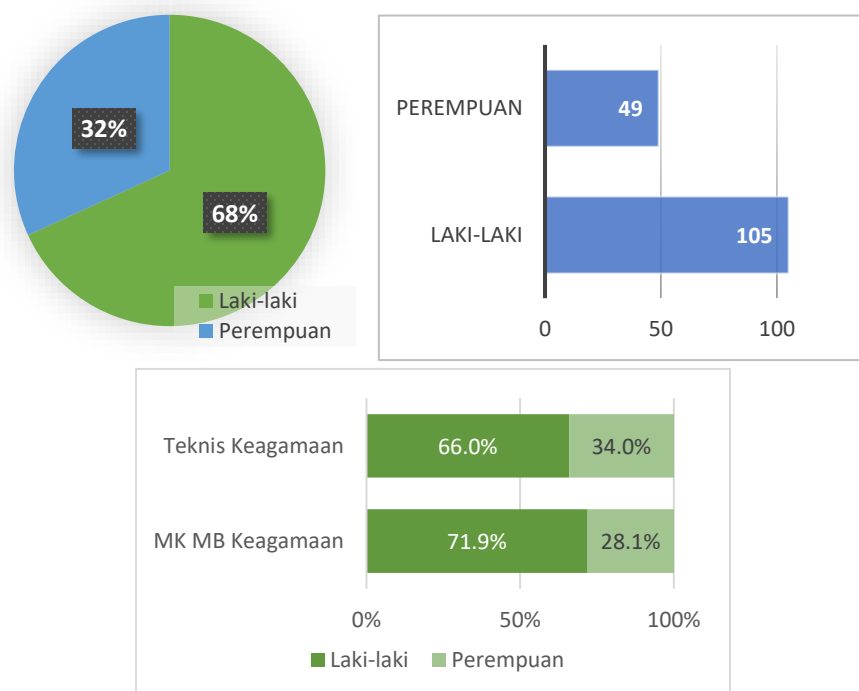
Tabel 3.1. Pelatihan oleh BDK Surabaya Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Pola Pelatihan
1	Bimtek Ekoteologi Kab. Gresik	10 – 11 Maret 2026	Bangkom Teknis SDM Keagamaan	Bimtek
2	Bimtek Ekoteologi Kab. Jombang	10 – 11 Maret 2026	Bangkom Teknis SDM Keagamaan	Bimtek
3	Bimtek Ekoteologi Kab. Malang	10 – 11 Maret 2026	Bangkom Teknis SDM Keagamaan	Bimtek
4	Bimtek Ekoteologi Kab. Pasuruan	10 – 11 Maret 2026	Bangkom Teknis SDM Keagamaan	Bimtek
5	Bimtek Ekoteologi Kab. Mojokerto	10 – 11 Maret 2026	Bangkom Teknis SDM Keagamaan	Bimtek
6	Pelatihan PPMB Kab. Lamongan	10 – 11 Maret 2026	Bangkom MK MB SDM Agama dan Keagamaan	PDWK
7	Pelatihan PPMB Kota Pasuruan	10 – 12 Maret 2025	Bangkom MK MB SDM Agama dan Keagamaan	PDWK
8	Pelatihan PPMB Kota Mojokerto	10 – 12 Maret 2025	Bangkom MK MB SDM Agama dan Keagamaan	PDWK

Selama periode pelaksanaan survei, tercatat sebanyak **154 responden** telah berpartisipasi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Partisipasi tersebut berasal dari berbagai jenis program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026. Secara rinci, jumlah responden yang mengikuti survei pada kegiatan Bangkom Teknis Keagamaan mencapai 97 orang, sedangkan pada kegiatan Bangkom MKMB Keagamaan tercatat sebanyak 57 orang responden.

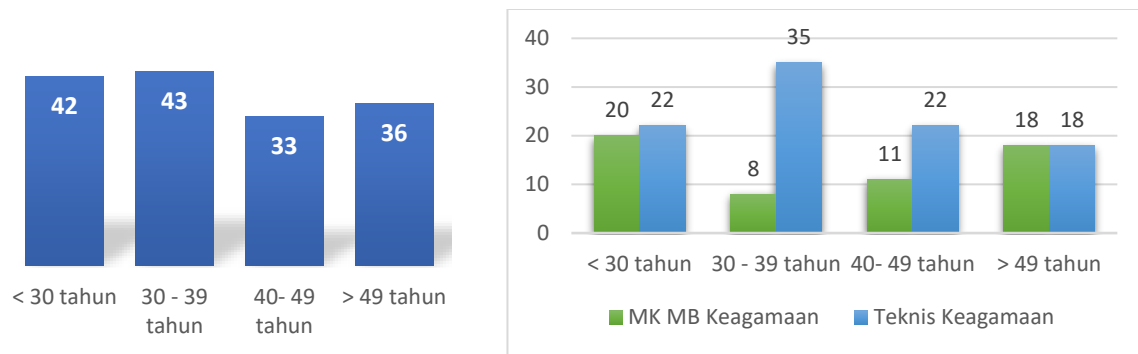
Jika dilihat dari komposisinya, responden dari Bangkom Teknis Keagamaan mendominasi dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan Bangkom MKMB Keagamaan. Kondisi ini sejalan dengan jumlah penyelenggaraan program, di mana Bangkom Teknis Keagamaan dilaksanakan dalam 5 angkatan, sedangkan Bangkom MKMB Keagamaan hanya terdiri dari 3 angkatan. Dengan demikian, jumlah partisipasi yang lebih tinggi pada program Teknis Keagamaan merupakan hal yang wajar karena mencerminkan jumlah peserta yang lebih banyak.

Meskipun demikian, perbedaan jumlah responden antar program tetap perlu diperhatikan dalam proses analisis, agar interpretasi hasil survei tetap proporsional dan tidak menimbulkan bias dalam penilaian secara keseluruhan. Oleh karena itu, hasil pengukuran perlu dianalisis dengan mempertimbangkan distribusi responden pada masing-masing jenis program.



Gambar 3.1. Karakteristik Gender Responden

Partisipasi peserta dalam pelatihan yang diadakan oleh BDK Surabaya selama Triwulan I tahun 2026 didominasi oleh peserta laki-laki yaitu sebanyak 105 orang atau sebesar 68%, sedangkan responden perempuan berjumlah 49 orang atau sebesar 32%. Jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan jenis pengembangan kompetensi, pada Bangkom Teknis Keagamaan, komposisi responden terdiri dari 66,0% laki-laki dan 34,0% perempuan. Sementara itu, pada Bangkom MK MB Keagamaan, proporsi responden laki-laki lebih tinggi, yaitu sebesar 71,9%, dibandingkan dengan perempuan sebesar 28,1%.



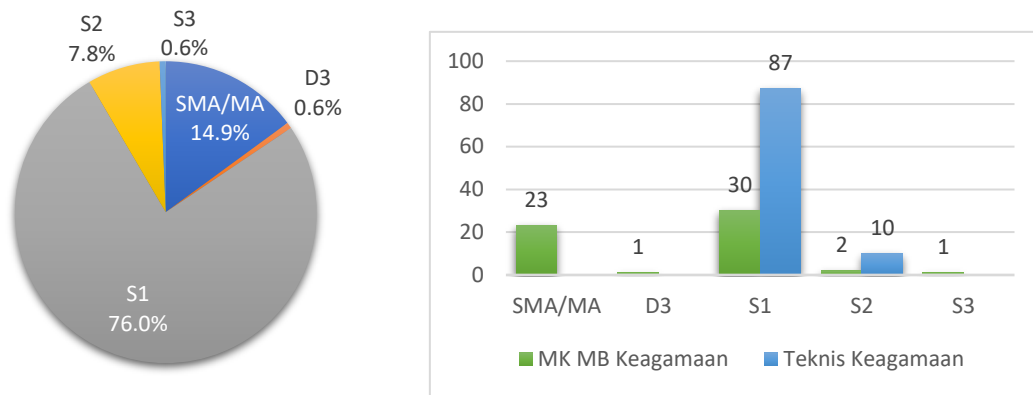
Gambar 3.2. Karakteristik Kelompok Umur Responden

Berdasarkan Gambar 3.2, karakteristik responden berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok usia produktif. Secara keseluruhan, jumlah responden terbanyak berada pada kelompok usia 30–39 tahun, yaitu sebanyak 43 orang, diikuti oleh kelompok usia <30 tahun sebanyak 42 orang. Sementara itu, kelompok usia >49 tahun merupakan yang paling sedikit dengan jumlah 36 responden, dan kelompok usia 40–49 tahun sebanyak 33 responden.

Apabila ditinjau berdasarkan jenis pengembangan kompetensi, pada Bangkom Teknis Keagamaan, jumlah responden terbanyak berasal dari kelompok usia 30–39 tahun sebanyak 35 orang, diikuti oleh kelompok usia <30 tahun dan 40–49 tahun masing-masing sebanyak 22 orang, serta kelompok usia >49 tahun sebanyak 18 orang. Sementara itu, pada Bangkom MK MB Keagamaan, distribusi responden relatif lebih merata, dengan jumlah terbanyak pada kelompok usia <30 tahun sebanyak 20 orang, diikuti kelompok usia >49 tahun sebanyak 18 orang, kelompok usia 40–49 tahun sebanyak 11 orang, dan kelompok usia 30–39 tahun sebanyak 8 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta pengembangan kompetensi berada pada rentang usia produktif, khususnya usia 30–39 tahun. Selain itu, terdapat perbedaan pola distribusi usia antara kedua jenis program, di mana Bangkom Teknis Keagamaan cenderung didominasi oleh usia menengah (30–39 tahun), sedangkan Bangkom MK MB Keagamaan memiliki sebaran usia yang lebih beragam. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam analisis lebih lanjut, karena karakteristik usia dapat memengaruhi persepsi dan penilaian responden terhadap layanan yang diberikan.

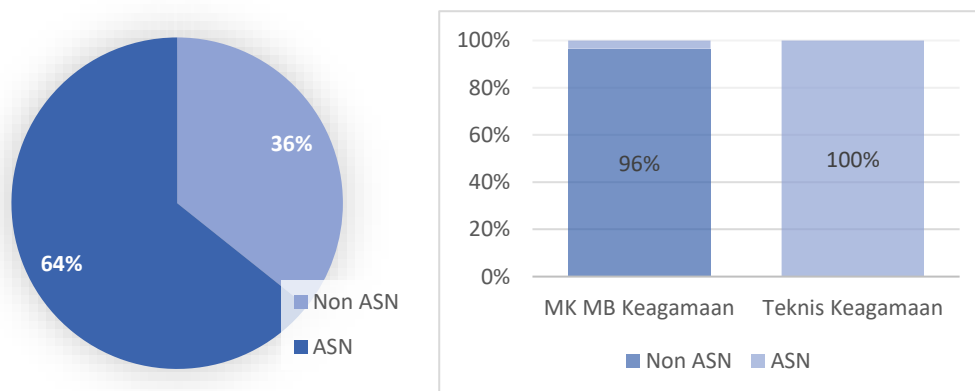
Gambar 3.3 memberikan informasi bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1), yaitu sebesar 76,0%. Selanjutnya, responden dengan pendidikan SMA/MA sebesar 14,9%, diikuti oleh Strata 2 (S2) sebesar 7,8%. Sementara itu, responden dengan pendidikan Diploma 3 (D3) dan Strata 3 (S3) masing-masing hanya sebesar 0,6%, sehingga jumlahnya relatif sangat kecil.



Gambar 3.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

Apabila ditinjau berdasarkan jenis pengembangan kompetensi, pada Bangkom Teknis Keagamaan, responden didominasi oleh lulusan S1 dengan jumlah 87 orang, diikuti oleh SMA/MA sebanyak 23 orang, serta S2 sebanyak 10 orang. Sementara itu, pada Bangkom MK MB Keagamaan, responden juga didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 30 orang, dengan jumlah yang jauh lebih kecil pada jenjang pendidikan lainnya, yaitu SMA/MA sebanyak 23 orang, D3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 2 orang, dan S3 sebanyak 1 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pengembangan kompetensi memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, khususnya pada jenjang S1. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki kapasitas akademik yang memadai dalam memahami materi pelatihan/bimtek maupun dalam memberikan penilaian terhadap layanan yang diterima. Oleh karena itu, hasil survei yang diperoleh dapat dianggap cukup representatif dalam menggambarkan persepsi peserta terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya.



Gambar 3.4. Karakteristik Pangkat/Golongan Responden

Berdasarkan Gambar 3.4, karakteristik responden berdasarkan status kepegawaian menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu sebesar 64%, sedangkan responden Non-ASN sebesar 36%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta pengembangan kompetensi merupakan pegawai yang berada dalam lingkup ASN.

Apabila ditinjau berdasarkan jenis pengembangan kompetensi, pada Bangkom Teknis Keagamaan seluruh responden (100%) merupakan ASN, tanpa adanya partisipasi dari Non-ASN. Sementara itu, pada Bangkom MK MB Keagamaan, responden didominasi oleh ASN sebesar 96%, dengan sebagian kecil lainnya merupakan Non-ASN sebesar 4%.

Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya selama triwulan I Tahun 2026 umumnya masih berfokus pada peningkatan kapasitas ASN. Tingginya proporsi ASN ini juga mengindikasikan bahwa hasil survei persepsi yang diperoleh lebih banyak merepresentasikan pandangan ASN sebagai penerima layanan.

### 3.2. HASIL PERHITUNGAN IPAK

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat sepuluh unsur yang dinilai dalam survei Persepsi Anti Korupsi. Berikut ini akan diuraikan hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk masing-masing unsur.

#### 3.2.1. Penilaian Setiap Unsur

##### a. Manipulasi Peraturan

Mayoritas responden menyatakan tidak terdapat praktik manipulasi peraturan dalam pelayanan yang diberikan. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi jawaban 'Tidak Ada' sebanyak 144 responden yang mengindikasikan bahwa integritas pelaksanaan layanan, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan telah berjalan dengan sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil responden yang memberikan penilaian 'Jarang' (6 responden), 'Selalu' (3 responden), dan 'Sering' (1 responden), yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap potensi manipulasi peraturan masih ada meskipun dalam proporsi yang sangat terbatas.

Tabel 3.2. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
<b>Selalu</b>	1	3	1,95%
<b>Sering</b>	2	1	0,65%
<b>Jarang</b>	3	6	3,90%
<b>Tidak Ada</b>	4	144	93,51%
<b>Jumlah</b>		<b>154</b>	<b>100%</b>



Gambar 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

Berdasarkan penilaian tersebut, indeks persepsi untuk unsur manipulasi peraturan adalah sebesar 3,89 sehingga dapat dikatakan bahwa BDK Surabaya **bersih dari tindakan manipulasi peraturan**. Menanggapi adanya potensi manipulasi peraturan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan konsistensi penerapan peraturan guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

#### b. Penyalahgunaan Jabatan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap unsur penyalahgunaan jabatan, mayoritas responden menyatakan tidak terdapat praktik penyalahgunaan jabatan dalam pelayanan, yang ditunjukkan oleh jumlah responden yang memilih jawaban 'Tidak Ada' sebanyak 151 orang. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang oleh petugas dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip integritas. Namun, masih terdapat masing-masing 1 responden yang memberikan penilaian 'Jarang', 'Sering', dan 'Selalu', yang menunjukkan adanya persepsi terhadap potensi penyalahgunaan jabatan meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas. Dari penilaian tersebut, unsur penyalahgunaan jabatan memperoleh indeks persepsi sebesar 3,96 yang mengantarkan BDK Surabaya kepada predikat **bersih dari penyalahgunaan jabatan**.

Masih adanya potensi penyalahgunaan jabatan menandakan perlunya upaya berkelanjutan dalam penguatan pengawasan dan pembinaan etika aparatur guna memastikan praktik penyalahgunaan jabatan tidak terjadi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Tabel 3.3. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0,65%
Sering	2	1	0,65%
Jarang	3	1	0,65%
Tidak Ada	4	151	98,05%
Jumlah		154	100%



Gambar 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

### c. Menjual Pengaruh

Dari total 154 responden, 145 orang diantaranya menyatakan tidak pernah dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya untuk membantu pengurusan berkas tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan layanan telah berlangsung secara profesional tanpa adanya intervensi kepentingan tertentu. Meski begitu, masih terdapat responden yang memberikan penilaian 'Jarang' sebanyak 4 orang, 'Sering' sebanyak 2 orang, dan 'Selalu' sebanyak 3 orang, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap praktik menjual pengaruh masih ada meskipun dalam proporsi yang relatif kecil. Dari penilaian tersebut didapatkan indeks persepsi sebesar 3,89 untuk unsur menjual pengaruh. Angka tersebut mengindikasikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari tindakan menjual pengaruh**.

Tabel 3.4. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	3	1,95%
Sering	2	2	1,30%
Jarang	3	4	2,60%
Tidak Ada	4	145	94,16%
Jumlah		154	100%



Gambar 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

Namun demikian diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan mengingat masih adanya potensi tindakan menjual pengaruh.

**d. Hadiah**

Berdasarkan hasil penilaian pada unsur hadiah/gratifikasi, sebagian besar responden menilai bahwa tidak terdapat praktik pemberian hadiah atau gratifikasi dalam proses pelayanan, sebagaimana tercermin dari 143 responden yang memilih jawaban ‘Tidak Ada’. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah mencerminkan komitmen terhadap integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kecil responden yang menyatakan ‘Jarang’ (1 orang), ‘Sering’ (4 orang), dan ‘Selalu’ (6 orang), yang mengindikasikan bahwa persepsi terhadap adanya praktik gratifikasi masih muncul, walaupun dalam proporsi yang relatif kecil. Berdasarkan penilaian tersebut, unsur gratifikasi memperoleh indeks persepsi sebesar 3,82. Angka ini dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari gratifikasi** atau penerimaan hadiah.

Tabel 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	6	3,90%
Sering	2	4	2,60%
Jarang	3	1	0,65%
Tidak Ada	4	143	92,86%
Jumlah		154	100%



Gambar 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

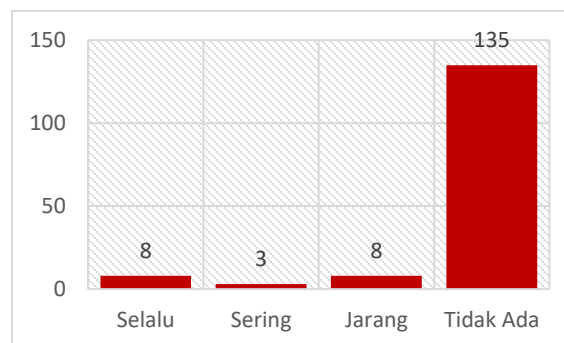
Di samping itu, penguatan upaya pencegahan melalui peningkatan pemahaman, pengawasan, serta penegakan aturan terkait gratifikasi tetap diperlukan untuk memastikan kualitas layanan yang bersih dan terpercaya.

#### e. Transparansi Biaya

Berdasarkan hasil penilaian pada unsur transparansi biaya, mayoritas responden menyatakan tidak terdapat permasalahan terkait transparansi biaya, ditunjukkan oleh 135 responden yang memilih jawaban 'Tidak Ada'. Hal ini sejalan dengan kondisi bahwa layanan yang diberikan tidak dipungut biaya (gratis), sehingga pada dasarnya tidak terdapat transaksi keuangan yang dibebankan kepada pengguna layanan. Namun demikian, masih terdapat responden yang menjawab 'Jarang' (8 orang), 'Sering' (3 orang), dan 'Selalu' (8 orang). Temuan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat persepsi kurangnya kejelasan, khususnya terkait prosedur administratif seperti penandatanganan bukti transaksi berupa SPJ atas hak-hak yang diterima. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan penjelasan kepada peserta terkait mekanisme administrasi tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta tetap menjamin transparansi dan akuntabilitas layanan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, didapatkan indeks persepsi publik sebesar **3,75**. Angka tersebut menunjukkan bahwa publik percaya bahwa BDK Surabaya bersih dalam hal transparansi biaya.

Tabel 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	8	5,19%
Sering	2	3	1,95%
Jarang	3	8	5,19%
Tidak Ada	4	135	87,66%
Jumlah		154	100%



Gambar 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

#### f. Pencaloan

Berdasarkan hasil penilaian pada unsur pencaloan, sebagian besar responden menyatakan tidak terdapat praktik pencaloan dalam proses pelayanan, yang ditunjukkan oleh 148 responden yang memilih jawaban 'Tidak Ada'. Hal ini mencerminkan bahwa layanan telah dilaksanakan secara langsung dan transparan tanpa perantara yang tidak resmi. Meski

begitu, masih terdapat responden yang memberikan penilaian ‘Jarang’ sebanyak 2 orang, ‘Sering’ sebanyak 1 orang, dan ‘Selalu’ sebanyak 3 orang, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap adanya praktik percaloan masih muncul meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pelayanan yang terbuka, memperjelas alur layanan, serta meningkatkan pengawasan guna mencegah potensi praktik percaloan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk unsur percaloan sebesar 3,92 yang menunjukkan bahwa BDK Surabaya **bersih dari praktik percaloan**.

Tabel 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	3	1,95%
Sering	2	1	0,65%
Jarang	3	2	1,30%
Tidak Ada	4	148	96,10%
Jumlah		154	100%



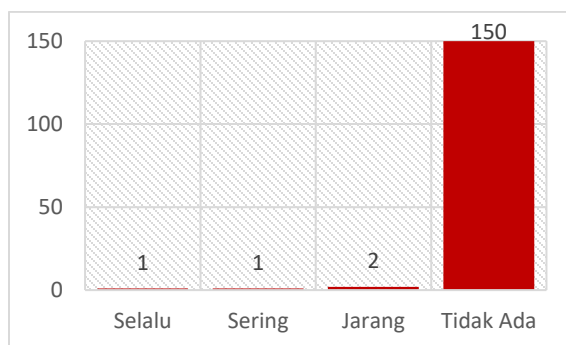
Gambar 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

#### g. Perbuatan Curang

Dari total responden sebanyak 154 responden, 150 orang di antaranya menyatakan bahwa tidak terdapat praktik kecurangan atau KKN dalam proses pelayanan di BDK Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan telah berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas dan bebas dari praktik penyimpangan. Sisanya sebanyak 2 orang atau sekitar 1,30 persen menyatakan jarang melihat/mendengar adanya praktik KKN di BDK Surabaya dan masing-masing 1 responden menjawab sering dan selalu melihat praktik KKN di BDK Surabaya. Dari skala 1-4, persepsi publik terhadap unsur perbuatan curang adalah sebesar **3,95**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari praktik KKN** (perbuatan curang).

Tabel 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0,65%
Sering	2	1	0,65%
Jarang	3	2	1,30%
Tidak Ada	4	150	97,40%
Jumlah		154	100%



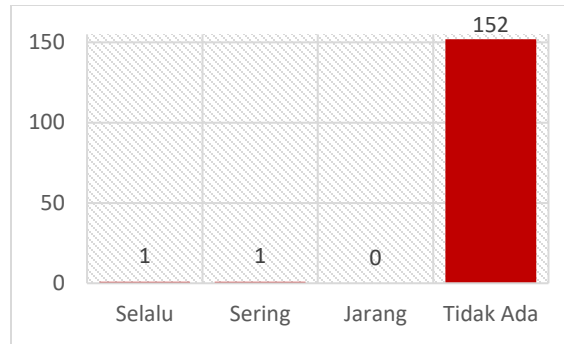
Gambar 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

#### h. Transaksi Rahasia

Pada triwulan pertama tahun 2026, unsur transaksi rahasia memperoleh indeks persepsi sebesar **3,97**. Berdasarkan tabel 3.9, dari total 154 responden, mayoritas besar yaitu 152 orang menyatakan ‘Tidak Ada’ praktik transaksi rahasia dalam proses layanan di BDK Surabaya. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak pernah melihat maupun merasakan adanya transaksi rahasia, sehingga mencerminkan tingkat integritas layanan yang sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat masing-masing 1 responden (0,65%) yang memberikan penilaian ‘Sering’ dan ‘Selalu’, sementara tidak ada responden yang memilih kategori ‘Jarang’. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap adanya transaksi rahasia masih muncul, namun dalam proporsi yang sangat kecil dan tidak signifikan.

Tabel 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0,65%
Sering	2	1	0,65%
Jarang	3	0	0,00%
Tidak Ada	4	152	98,70%
Jumlah		154	100%



Gambar 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

Secara keseluruhan, distribusi jawaban tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap unsur transaksi rahasia berada pada kondisi yang sangat baik atau bersih dari praktik tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa publik menganggap BDK Surabaya **bersih dari transaksi rahasia**.

#### i. Transparansi Aduan

Berdasarkan hasil penilaian pada unsur transparansi aduan, mayoritas responden menyatakan tidak terdapat permasalahan terkait transparansi dalam mekanisme pengaduan, yang ditunjukkan oleh 136 responden yang memilih jawaban 'Tidak Ada'. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan aduan dinilai telah berjalan dengan cukup terbuka dan dapat diakses oleh pengguna layanan.

Namun demikian, masih terdapat responden yang memberikan penilaian 'Jarang' sebanyak 6 orang, 'Sering' sebanyak 1 orang, dan 'Selalu' sebanyak 11 orang. Jumlah pada kategori 'Selalu' yang relatif lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya menunjukkan bahwa persepsi terhadap kurangnya transparansi dalam penanganan aduan masih dirasakan oleh sebagian responden. Hal ini menjadi perhatian penting untuk dilakukan perbaikan.

Tabel 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	11	7,14%
Sering	2	1	0,65%
Jarang	3	6	3,90%
Tidak Ada	4	136	88,31%
Jumlah		154	100%



Gambar 3.13. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam penyampaian informasi terkait mekanisme pengaduan, kejelasan tindak lanjut aduan, serta keterbukaan dalam proses penanganannya agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai indeks persepsi untuk unsur transparansi aduan sebesar 3,73, yang membawa BDK Surabaya pada predikat **bersih dalam hal transparansi aduan**.

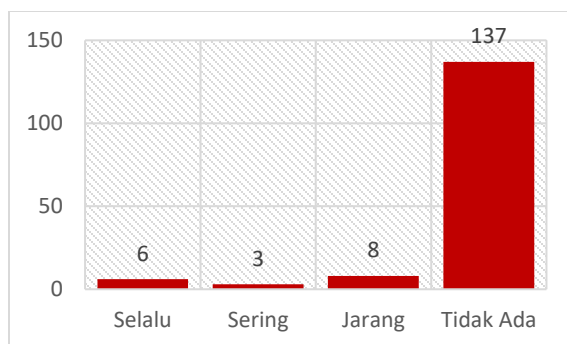
#### j. Respon Terhadap Aduan

Berdasarkan hasil penilaian pada unsur respon terhadap aduan, mayoritas responden menyatakan tidak terdapat permasalahan dalam tindak lanjut pengaduan, yang ditunjukkan oleh 137 responden yang memilih jawaban 'Tidak Ada'. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme penanganan aduan dinilai telah berjalan dengan cukup responsif dan sesuai harapan pengguna layanan.

Namun demikian, masih terdapat responden yang memberikan penilaian 'Jarang' sebanyak 8 orang, 'Sering' sebanyak 3 orang, dan 'Selalu' sebanyak 6 orang. Adanya penilaian pada kategori tersebut menunjukkan bahwa sebagian responden masih merasakan adanya kekurangan dalam kecepatan maupun kualitas respon terhadap aduan yang disampaikan.

Tabel 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	6	3,90%
Sering	2	3	1,95%
Jarang	3	8	5,19%
Tidak Ada	4	137	88,96%
Jumlah		154	100%



Gambar 3.14. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam mempercepat tindak lanjut aduan, memperjelas alur respons, serta memastikan konsistensi penanganan pengaduan agar lebih optimal. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai Indeks Persepsi untuk unsur respon terhadap aduan sebesar 3,79, yang berarti bahwa BDK Surabaya **bersih dalam hal respon terhadap aduan**.

### 3.3. REKAPITULASI NILAI

Secara umum, seluruh unsur penilaian memperoleh nilai persepsi yang tinggi, dengan rentang skor antara 3,73 hingga 3,97. Seluruh nilai tersebut berada pada kategori “Bersih dari korupsi”, yang berarti kinerja pelayanan BDK Surabaya dinilai sangat baik dari perspektif integritas dan bebas dari praktik korupsi. Unsur dengan nilai tertinggi adalah manipulasi peraturan (3,97), diikuti oleh penyalahgunaan jabatan (3,96) dan menjual pengaruh (3,95). Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi bahwa tidak terdapat praktik-praktik penyimpangan serius dalam aspek tersebut.

Tabel 3.12. Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya

UNSUR PENILAIAN	NILAI PERSEPSI	KINERJA UNIT PELAYANAN
MANIPULASI PERATURAN	3,97	Bersih dari korupsi
PENYALAHGUNAAN JABATAN	3,96	Bersih dari korupsi
MENJUAL PENGARUH	3,95	Bersih dari korupsi
HADIAH	3,92	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI BIAYA	3,89	Bersih dari korupsi
PENCALOAN	3,89	Bersih dari korupsi
PERBUATAN CURANG	3,82	Bersih dari korupsi
TRANSAKSI RAHASIA	3,79	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI ADUAN	3,75	Bersih dari korupsi
RESPON TERHADAP ADUAN	3,73	Bersih dari korupsi
<b>NILAI IPAK</b>	<b>3,87</b>	<b>Bersih dari korupsi</b>

Sementara itu, unsur dengan nilai relatif lebih rendah, meskipun tetap dalam kategori baik, adalah respon terhadap aduan (3,73), transparansi aduan (3,75), dan transaksi rahasia (3,79). Hal

ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam hal pengelolaan pengaduan dan transparansi prosesnya, agar persepsi publik dapat semakin meningkat. Adapun nilai rata-rata Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,87 menegaskan bahwa secara keseluruhan BDK Surabaya memiliki citra yang sangat bersih dari korupsi dan mampu menjaga integritas dalam penyelenggaraan layanan.

Tabel 3.13 membandingkan nilai persepsi anti korupsi antara dua jenis pengembangan kompetensi, yaitu MKMB Keagamaan dan Teknis Keagamaan. Secara umum, kedua jenis layanan bangkom menunjukkan kinerja yang sangat baik karena seluruh nilai persepsi berada pada kategori “bersih dari korupsi”. Dilihat dari nilai rata-rata IPAK, layanan Bangkom Teknis Keagamaan memiliki skor sedikit lebih tinggi dibandingkan layanan Bangkom MKMB Keagamaan, yakni 3,88 berbanding 3,86. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi integritas pada layanan bangkom teknis keagamaan dinilai sedikit lebih baik, meskipun selisihnya sangat tipis.

Tabel 3.13. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Jenis Pengembangan Kompetensi

UNSUR PENILAIAN	IPAK	
	MKMB KEGAMAAN	TEKNIS KEGAMAAN
<i>Manipulasi Peraturan</i>	3,89	3,89
<i>Penyalahgunaan Jabatan</i>	3,96	3,96
<i>Menjual Pengaruh</i>	3,86	3,91
<i>Hadiah</i>	3,74	3,88
<i>Transparansi Biaya</i>	3,60	3,85
<i>Pencaloan</i>	3,88	3,94
<i>Perbuatan Curang</i>	3,98	3,94
<i>Transaksi Rahasia</i>	4,00	3,95
<i>Transparansi Aduan</i>	3,79	3,70
<i>Respon Terhadap Aduan</i>	3,86	3,75
<b>NILAI IPAK</b>	<b>3,86</b>	<b>3,88</b>

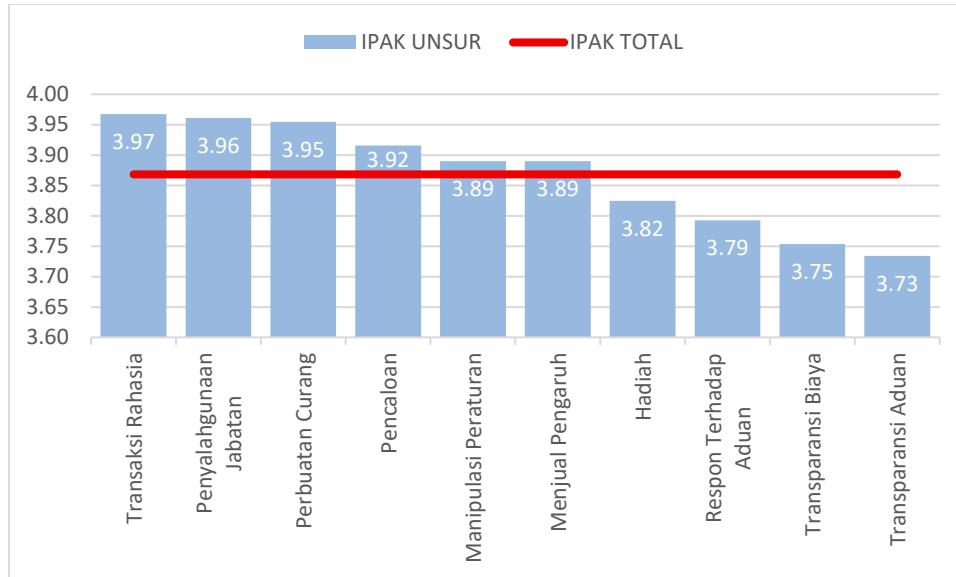
Pada layanan bangkom **MKMB Keagamaan**, nilai tertinggi terdapat pada unsur **transaksi rahasia (4,00)** dan **perbuatan curang (3,98)**, yang menunjukkan persepsi sangat kuat bahwa praktik tersebut tidak terjadi. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada **transparansi biaya (3,60)** dan **hadiah (3,74)**, yang mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan terutama dalam aspek keterbukaan biaya dan potensi gratifikasi.

Pada **Teknis Keagamaan**, nilai tertinggi terdapat pada **transaksi rahasia (3,95)** dan **pencaloan (3,94)**, menunjukkan persepsi yang sangat baik terhadap bebasnya praktik tersebut. Sebaliknya, nilai terendah terdapat pada **transparansi aduan (3,70)** dan **respon terhadap aduan (3,75)**, yang mengindikasikan bahwa aspek pengelolaan pengaduan masih perlu ditingkatkan.

Jika dibandingkan antar unsur, terlihat bahwa:

- **MKMB Keagamaan** unggul pada aspek seperti **perbuatan curang, transaksi rahasia, dan respon terhadap aduan.**
- **Teknis Keagamaan** lebih unggul pada **transparansi biaya, pencaloan, dan hadiah.**

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kedua jenis pengembangan kompetensi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mencegah praktik korupsi. Namun demikian, peningkatan masih diperlukan terutama pada aspek **transparansi biaya** di MKMB Keagamaan serta **pengelolaan dan transparansi aduan** pada Teknis Keagamaan agar kualitas integritas layanan semakin optimal.



Gambar 3.15. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian

Gambar 3.15 menunjukkan bahwa seluruh unsur penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) memiliki nilai yang tinggi dan berada dalam kategori “bersih dari korupsi”, dengan rata-rata IPAK total sebesar 3,87. Beberapa unsur bahkan berada di atas rata-rata tersebut, seperti transaksi rahasia (3,97), penyalahgunaan jabatan (3,96), perbuatan curang (3,95), dan pencaloan (3,92), yang mencerminkan kuatnya persepsi responden bahwa praktik-praktik tersebut tidak terjadi. Di sisi lain, terdapat beberapa unsur yang nilainya berada sedikit di bawah rata-rata, seperti manipulasi peraturan (3,89) dan menjual pengaruh (3,89) yang masih relatif mendekati nilai rata-rata, serta hadiah (3,82), respon terhadap aduan (3,79), transparansi biaya (3,75), dan transparansi aduan (3,73). Meskipun masih dalam kategori baik, nilai-nilai yang lebih rendah ini mengindikasikan adanya ruang perbaikan, terutama pada aspek transparansi dan pengelolaan aduan. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa kinerja pelayanan telah mencerminkan integritas yang sangat baik, namun tetap perlu upaya peningkatan agar kualitas persepsi anti korupsi semakin merata di seluruh unsur penilaian.

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Gambaran dan analisis hasil capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai nilai **3,87** dari skala 4. Hal ini berarti bahwa masyarakat percaya bahwa layanan yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari korupsi.
2. Kepercayaan masyarakat bahwa Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari transaksi rahasia mencapai 3,97 dari skala 4 dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan unsur lainnya.
3. Unsur “transparansi aduan” merupakan unsur dengan nilai persepsi paling rendah dibandingkan unsur lainnya. Meski begitu, secara umum kinerja untuk unsur ini masuk dalam kategori “bersih dari korupsi”.

### 4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas,, Balai Diklat Keagamaan Surabaya perlu mempertahankan kinerja yang telah baik, khususnya pada aspek integritas layanan yang telah memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Upaya penguatan budaya kerja yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme perlu terus dilanjutkan agar capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi tetap terjaga dan meningkat.

Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada unsur transparansi aduan yang memperoleh nilai paling rendah dibandingkan unsur lainnya. Perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan keterbukaan informasi terkait mekanisme pengaduan, kejelasan alur dan tindak lanjut aduan, serta penyampaian hasil penanganan aduan kepada pengguna layanan. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh aspek pelayanan, termasuk dalam hal pengelolaan aduan, dapat semakin meningkat.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Kuesioner



### SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA TAHUN 2026

Bapak/Ibu yang terhormat,  
Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah; Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keagamaan Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menjadi lembaga yang bersih dari korupsi.

Oleh karena itu, kami mengadakan survey secara online. Tujuan survey ini adalah untuk melihat persepsi peserta pelatihan terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Melalui Survei Persepsi Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2026, kami berharap mampu memetakan potensi korupsi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kami berharap Bapak/Ibu bisa ikut berpartisipasi dalam survey ini. Kami sangat menghargai kejujuran dan objektivitas bapak/ibu dalam mengisi semua data survey ini. Partisipasi bapak/ibu sebagai responden secara tidak langsung sudah membantu kami dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah NKRI. Kami menjamin bahwa semua data responden dan jawaban yang diberikan bersifat RAHASIA serta tidak akan dipublikasikan sebagai jawaban pribadi responden. Atas kerja sama yang Bapak/Ibu berikan, kami sampaikan terima kasih

<p>Jenis Kelamin *</p> <p><input type="radio"/> Laki-laki</p> <p><input type="radio"/> Perempuan</p>	<p>Pangkat/Golongan *</p> <p>Pilih ▾</p>
<p>Usia *</p> <p>Jawaban Anda _____</p>	<p>No. HP</p> <p>Jawaban Anda _____</p>
<p>Pendidikan Terakhir *</p> <p><input type="radio"/> SMA/MA</p> <p><input type="radio"/> D3</p> <p><input type="radio"/> S1</p> <p><input type="radio"/> S2</p> <p><input type="radio"/> S3</p>	<p>Instansi *</p> <p>Contoh: Kankemenag Kab. Pacitan</p> <p>Jawaban Anda _____</p>
	<p>Unit Tugas *</p> <p>Jawaban Anda _____</p>

Pengembangan Kompetensi yang Diikuti pada Tahun 2026 \*

Pilih

---

Apakah pemberian layanan di BDK Surabaya dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) \*

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah layanan pada BDK Surabaya diberikan dengan permintaan imbalan tertentu oleh petugas? (Penyalahgunaan Jabatan) \*

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah Anda menandatangani bukti transaksi berupa SPJ atas hak-hak yang diterima? (Transparansi) \*

1. Tidak Ada 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

1 2 3 4

---

Apakah Anda pernah mengetahui ada praktik pencaloan dalam proses layanan di BDK Surabaya? (Pencaloan) \*

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah Anda pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktik KKN di BDK Surabaya? (Perbuatan Curang) \*

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Pernahkah Anda dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya yang akan membantu dalam pengurusan berkas tertentu? (Menjual Pengaruh) \*

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta? (Hadiah) \*

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah Anda pernah mengurus berkas tertentu melalui pegawai BDK Surabaya di luar kantor? (Transaksi Rahasia) \*

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah BDK Surabaya tidak terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi? \*

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah BDK Surabaya merespon lambat pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi? \*

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

## Lampiran 2. Rekap Respon

2026 - TR 1 - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Help Acrobat Power Pivot Tell me what you want to do

Calibri Light 11

General

Clipboard Font Alignment Number Date Conditional Formatting Format as Table Cell Styles Insert Delete Format Cells Sort & Find & Filter Edit Add-ins Create a PDF

AB12 Transparansi Aduan

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
JK	Usia	Kel. Usia	Pendid	Pangkat/Golongan	Bangkom yang Dikuti pada Tahun 202	Instansi	Rumpun	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10			
1	Laki-laki	47	40 - 49 tahun	S1	PPPK IX	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kemenag kab Mojokerto	Teknis Keagamaan	3	3	2	2	2	2	2	2	2			
2	Laki-laki	33	30 - 39 tahun	S1	PPPK IX	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
3	Laki-laki	37	30 - 39 tahun	S1	PPPK IX	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
4	Laki-laki	39	30 - 39 tahun	S1	PPPK IX	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
5	Perempuan	51	> 49 tahun	S1	Penata Muda Tk I - III/b	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
6	Perempuan	55	> 49 tahun	S1	Penata Tk I - III/d	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
7	Perempuan	43	40 - 49 tahun	S1	PPPK IX	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1		
8	Laki-laki	46	40 - 49 tahun	S1	PPPK IX	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
9	Laki-laki	52	> 49 tahun	S2	Penata Tk I - III/d	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Pacitan	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
10	Laki-laki	41	40 - 49 tahun	S1	PPPK IX	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1		
11	Perempuan	45	40 - 49 tahun	S1	Penata Tk I - III/d	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kabupaten Mojok	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
12	Perempuan	52	> 49 tahun	S2	Penata Tk I - III/d	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
13	Laki-laki	48	40 - 49 tahun	S1	Penata Tk I - III/d	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
14	Laki-laki	33	30 - 39 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Gresik	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
15	Laki-laki	52	> 49 tahun	S1	Penata Tk I - III/d	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
16	Laki-laki	26	< 30 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Gresik	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
17	Laki-laki	56	> 49 tahun	S1	Penata Tk I - III/d	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
18	Laki-laki	24	< 30 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Gresik	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
19	Laki-laki	50	> 49 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
20	Perempuan	39	30 - 39 tahun	S1	PPPK IX	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
21	Laki-laki	28	< 30 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Gresik	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
22	Perempuan	35	30 - 39 tahun	S1	PPPK IX	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Mojokerto	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
23	Laki-laki	25	< 30 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Gresik	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
24	Laki-laki	28	< 30 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Gresik	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
25	Laki-laki	29	< 30 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Malang	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
26	Laki-laki	29	< 30 tahun	S1	Penata Muda - III/a	Bimbingan Teknis EKoteologi	Kankemenag Kab. Malang	Teknis Keagamaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4			

raw all pivot grafis mlmb keag t.keagamaan

Ready Accessibility: Investigate 85%